IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN DESA WONODADI NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DI KECAMATAN SELAT PENUGUAN
KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Siti Muslehah

Nim. 07011181520017

Konsentrasi kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, Ogan Ilir

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN DESA WONODADI NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DI KECAMATAN SELAT PENUGUAN
KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh

SITI MUSLEHAH
07011181520017

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2019

Pembimbing I

Drs. Joko Siswanto, M.Si
Nip.195706051985031003

Pembimbing II

Drs. Gatot Budiarto, MS
Nip. 195806091984031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 05 Juli 2019.

Inderalaya, 05 Juli 2019

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si
   NIP. 195706051985031003 .....

Anggota

2. Drs. Gatot Budiarto, MS
   NIP. 195806091984031002 .....

3. Drs. Mardianto, M.Si
   NIP. 196211251989121001 .....

4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
   NIP. 198108272009121002 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikaum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentanag Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang ilmu administrasi publik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya (FISIP UNSRI). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena, itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di Universitas Sriwujaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailanai Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan bimbingan nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasihat dan motivasi serta masukan yang baik selama proses penyelesaian penulisan ini.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasihat daan motivasi serta masukan yang baik selama proses penyelesaian penulisan.
7. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memebrikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Segenap karyawan FISIP unsri yang telah memberikan bantuan dalam kelengkapan akademik selama proses perkuliahan.
9. Bapak Anaim selaku Kepala Desa Wonodadi serta jajarannya yang telah bersedia untuk menerima penulis melakukan penelitian di desa tersebut.
10. Bapak Supakat selaku Direktur BUMDes yang telah bersedia diwawancarai dan dan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
11. Kedua orang tua dan adik kakakku terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku Rayi Sari Anggrek, Merlin Ulfa Prisilia, Essy Elfera Nica, Ade Amilia Alkiki terima kasih membagi waktu untuk memebrikan dukungan dan motivasi kepada penulis
13. Almamaterku Fisip Unsri 2015, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan selama menjalani perkuliahan dan kehidupan kampus yang akan selalu penulis rindukan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca.

Inderalaya, Juni 2019

SITI MUSLEHAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR SINGKATAN viiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Msalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 11
   1. Kebijakan Publik 11
   2. Implementasi Kebijakn Publik 12
   3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik 14
      1. Model Implementasi Kebijakan van Meter dan Van Horn 14
      2. Model Implementasi kebijakan George C. Edward III 17
      3. Model Implementasi Merilee S. Grindle 20
      4. Model Implementasi Daniel H. Mazmanian dan Paul Sabatier 21
B. Model Implementasi Kebijakan yang Digunakan 25
C. Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 27

D. Penelitian Terdahulu 29
E. Kerangka Pemikiran 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 32
B. Definisi Konsep 32
C. Fokus Penelitian 34
D. Unit Analisis data 38
E. Jenis dan sumber Data 39
F. Informan Penelitian 39
G. Teknik Pengumpulan Data 40
H. Teknik analisis Data 41
I. Sistem Penulisan 42

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Wonodadi 44
B. Gambaran Umum BUMDes Desa Wonodadi 50
C. Hasil dan Pembahasan 53
    1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 53
    2. Sumberdaya 56
    3. Karakterristik Agen Pelaksana 67
    4. Sikap/kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana 70
    5. Komunikasi Antar Organisasi 73
    6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jenis Usaha BUMDes Desa Wonodadi 3
2. Tabel 2. Hasil Usaha BUMDes Desa Wonodadi 6
3. Tabel 3.Target dan Realisasi BUMDes Desa Wonodadi 7
4. Tabel 4. Penelitian Terdahulu 29
5. Tabel 5. Fokus Penelitian 35
6. Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 48
7. Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian 49
8. Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 49
9. Tabel 9. Hasil Usaha BUMDes Desa Wonodadi 56
10. Tabel 10. Data Pegawai BUMDes Desa Wonodadi 58
11. Tabel 11. Pendapatan Unit Usaha Pelabuhan Lapak Kelapa Sawit 62
12. Tabel 12. Inventaris Barang BUMDes Unit Usaha sewa Peralatan Hiburan 64
13. Tabel 13. Pendapatan Unit Usaha Sewa Peralatan Hiburan 64
14. Tabel 14. Pendapatan Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 66
15. Tabel 15. Pekerjaan Masyarakat Desa Wonodadi 78
16. Tabel 16. Matriks Kebijakan BUMDes Desa Wonodadi 81

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn 17
2. Gambar 2. Model Implementasi Kbijakan Menurut George Edward III 20
3. Gambar 3. Model Pendekatan A Framework For Implementation Analysis 24
4. Gambar 4. Kerangka Pemikiran 31
5. Gambar 5. Kantor Desa Wonodadi 45
6. Gambar 6. Struktur Organisasi Desa wonodadi 46
7. Gambar 7. Foto Kondisi Pelabuhan Lapak Kelapa Sawit 61
8. Gambar 8. Foto hajatan orang yang menyewa peralatan hiburan 63
9. Gambar 9. Perkebunan Kelapa Sawit 66

DAFTAR SINGKATAN

1. BUMDes : Badan Usaha Milik Desa
2. PADes : Pendapatan Asli Desa
3. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
4. APBN : Anggaran Pendapatan dan Benlanja Negara
5. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
7. Kades : Kepala Desa
8. Kaur : Kepala Urusan
9. Kadus : Kepala Dusun
10. SOP : Standar Operasional Prosedur

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Permasalahan pada penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonodadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonodadi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Teori yang digunakan untuk mengkaji implmentasi kebijakan yaitu menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan dimensi tujuan dan ukuran kebijakan, sumberdaya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi/sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonodadi masih mengalami beberapa kendala dan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis berdasarkan indikator-indikator yang menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn belum terimplementasi dengan baik. Terdapat dua indikator yang menghambat kinerja implementasi kebijkan publik pertama, sumberdaya yang kurang memadai dilihat dari jumlah pegawai yang hanya berjumlah 10 orang, kemudian dalam sumberdaya finansial masih terdapat kekurangan dana. Kedua, komunikasi antar organisasi, komunikasi yang dilakukan tidak terjadwal dan dilakukan hanya pada saat urgen saja. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan implementasi dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahwa perlu melakukan kajian-kajian dan diskusi baik dengan para pelaksana kebijakan, pemerintah desa dan masyarakat umum guna mendapatkan masukan-masukan baru untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonodadi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Joko Siswanto, M. Si	**Drs. Gatot Budiarto, MS**
NIP. 195706051985031003	**NIP. 195806091984031002**

Inderalaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Wonodadi Village Regulation Number 09 of 2016 concerning Village-Owned Enterprises. The problem in this study is that the business results of the Village-Owned Enterprises are still not optimal. The purpose of this study was to find out how the implementation of the policy of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Wonodadi Village and to know the factors that influence the performance of policy implementation. The theory used to assess the implementation of policies is to use the theory of Van Metter and Van Horn with dimensions of policy objectives and measures, resources, characteristics of implementing agencies, communication between implementing agencies, implementing dispositions / attitudes, and economic, social and political environments. This study uses a type of qualitative descriptive research. The results of this study concluded that the implementation of the policy of Village-Owned Enterprises in Wonodadi Village still experienced several obstacles and had not gone well. This can be seen from the analysis based on indicators using the theory of the Van Meter and Van Horn that have not been implemented properly. There are two indicators that hinder the performance of the implementation of the first public policy, inadequate resources seen from the number of employees who only number 10 people, then in financial resources there is still a lack of funds. Second, communication between organizations, communication that is carried out is not scheduled and carried out only at urgent times. From the results of these studies can be used as a material to improve the implementation of the policy of Village-Owned Enterprises that it is necessary to conduct studies and discussions both with policy implementers, village governments and the general public in order to obtain new inputs to improve the implementation of Owned Enterprise policies Village in Wonodadi Village.

Keywords: Implementation, Village Regulations, Village-Owned Enterprises.

Supervisor I

Drs. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 195706051985031003

Supervisor II

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Inderalaya, July 2019
Chairman Departement of Public Administration
Faculty of Social and Political Scienes
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat setelah diberlakukannya otonomi daerah. Era otonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan meanjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang diatur dalam Undang-undaang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa merupakan daerah otonom dan berhak mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagaian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan insfratuktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan baru. Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga

dianjurkan untuk memliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undag tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonodadi untuk menambah pendapatan desanya dengan membuat Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa tersebut diberi nama “Dadi Berkat”, dengan adanya perturan tersebut maka usaha-usaha yang didirikan akan lebih teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usaha-usaha yang didirikan oleh pemerintah Desa sesuai dengan potensi yag dimiliki oleh Desa dan dalam pengelolaannya di lakukan oleh pengurus BUMDes sendiri dan sudah diatur dalam Peraturan Desa terkait BUMDes.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dengan adanya BUMDes ini masyarakat dapat berpartispasi untuk meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga akan tercipta desa yang mandiri dan mengurangi angka kemiskinan di desa.

BUMDes ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di Desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, Kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Wonodadi juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola aset yang dimiliki oleh desa baik fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Pengelolaan BUMDes di Desa Wonodadi dilakukan dengan baik dan memanajemen dengan baik, sehingga tatakelola BUMDes ini mampu menambah penghasilhan pendapatan desa. Jenis usaha BUMDes di Desa Wonodadi tidak banyak, hanya memiliki tiga usaha. Ketiga jenis usaha BUMDes Wonodadi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Usaha BUMDes di Desa Wonodadi

No.	**Jenis Usaha**	**Kepala Unit**	**Tahun Berdiri**
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	Elon	2006
2.	Sewa Peralatan Hiburan (Tenda, kursi, alat makan dan lain-lain)	Supakat	2015
3.	Pengelolaan Pelabuhan Lapak Kelapa Sawit.	Dayat	2017

Sumber : Direktur BUMDes Desa Wonodadi, 2018

Program pertama, adalah perkebunan kelapa sawit. Desa Wonodadi sebagai salah satu desa di Kecamatan selat Penuguan yang memiliki tanah yang cukup subur dan cocok untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu pemerintah desa memanfaatkannya dengan melakukan penanaman kelapa sawit sebagai salah satu usaha milik

desa. Penanaman itu dilakukan dilahan milik pemerintah desa, yang nantinya dapat membantu perekonomian desa dan menambah pendapatan desa. Jika dilihat, usaha ini cukup menjanjikan untuk menambah perekonomian desa karena perkebunan kelapa sawit dapat di panen 2 kali dalam sebulan dan tentunya hal ini akan menambah pendapatan desa.

Pekebunan kelapa sawit ini dimulai sejak tahun 2006 dengan seluas 8 Ha dan melalui proses yang cukup panjang hingga dapat memanen buahnya. Mulai dari penanaman, perawatan, pemupukan dan sampai perkebunan sawit tersebut dapat tumbuh sehingga buahnya sudah dapat dipanen. Perkebunan kelapa sawit dapat dipanen mulai dari akhir tahun 2016 dengan hasil yang masih sedikit mengingat perkebunan tersebut yang kurang subur dan kurang perawatan.

Jika dibandingkan dengan perkebunan kepala sawit milik pribadi maka perkebunan milik desa ini belum cukup baik karena hasil panen dari perekebunan tersebut belum banyak sedangkan milik pribadi dengan luas yang sama dan usia yang sama namun hasil panen nya lebih banyak. Perkebunan milik pribadi dilakukan perawatan dengan teratur sehingga menghasilkan buah yang melimpah dan hasil panen yang cukup banyak di banding peprkebunan milik desa.

Porgram kedua, adalah Sewa peralatan hiburan. Program sewa peralatan hiburan ini dilakukan untuk menambah pendapatan desa. Adapun peralatan yang disewakan adalah tenda, kursi, meja, alat makan dan lain-lain. Dimana tenda yang disewakan yaitu untuk acara-acara seperti acara resepsi pernikahan, khitanan dan acara lainnya. Adapun investasi yang dimiliki oleh Desa Wonodadi yaitu tenda 8 unit, meja 17 buah, dan kursi137 buah, serta alat-alat makan seperti piring, sendok, mangkok dan lain sebagainya. Harga sewa tenda tersebut adalah RP.400.000. Program ini cukup menjanjkan karena banyak masyarakat yang membutuhkan untuk melakukan acara-acara resepsi, sehingga masyarakat dapat terbantu dan desa pun mendapatkan untung.

Hasil usaha sewa tenda ini dilihat dari minat masyarakat dan orang yang memiliki hajat, sehingga hasilnya tidak menentu. Jika dalam satu tahun banyak yang memiliki hajat dan menggunakan tenda milik Desa Wonodadi maka hasilnya akan cukup banyak dan dapat menambah pendapatan desa. Sewa tenda ini tidak hanya untuk warga masyarakat Desa Wonodadi saja melainkan desa lainpun dapat menyewanya, namun dengan harga yang sedikit berbeda yaitu dengan harga Rp.450.000

Program sewa tenda ini dilakukan sejak tahun 2011 namun pada saat itu tidak terkoordinir sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Sejak tahun 2016 usaha ini mulai di bukukan dan dipertanggungjawabkan sehingga sampai saat ini masih dipertahankan dan terus diperbaiki untuk menambah investasi yang dimiliki oleh desa. Pendapatan yang dihasilkan dari program sewa tenda ini masukan ke dalam kas desa dan digunakan untuk keperluan desa dan perawatan barang milik desa.

Program ketiga, adalah Pengelolaan pelabuhan lapak kelapa sawit. Usaha ini dimulai sejak tahun 2017 dengan memanfaatkan lahan yang ada di Desa. Usaha ini dilakukan mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Selat Penuguan adalah berpenghasilan kelapa sawit, sehingga diperlukan tempat untuk bongkar muat kelapa sawit yang sudah dipanen dan akan dibawak ke pabrik pengolahan sawit. Dalam satu bulan penjual kelapa sawit harus membayar kepada desa sebesar Rp.750.000. Hasil uang tersebut digunakan untuk perbaikan jalan dan perawatan barang milik desa serta nantinya masuk dalam kas desa.

Pelabuhan yang dimiliki oleh Desa Wonodadi adalah sebanyak 2 pelabuhan dan masing-masing tempat dilakukan untuk mengangkut kelapa sawit dan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi minyak. Pelabuhan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para penjual kelapa sawit.

Berikut hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Wonodadi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Usaha BUMDes Desa Wonodadi

Jenis Usaha	**Jumlah Pendapatan/tahun**		
	2016	**2017**	**2018**
Perkebunan Kelapa Sawit	Rp.1.745.000	Rp.3.742.000	Rp.8.769.750
Sewa Peralatan Hiburan (Tenda, kursi, alat makan dan lain-lain)	Rp.3.750.000	Rp.6.050.000	Rp.3.350.000
Pengelolaan Pelabuhan Lapak Kelapa Sawit	-	Rp.7.750.000	Rp.6.950.000
Jumlah		**Rp.17.542.000**	**Rp.19.069.750**

Sumber : Direktur BUMDes Desa Wonodadi, 2018

Dilihat dari tabel di atas menunjukan bahwa usaha BUMDes belum berjalan dengan baik, seperti usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilihat bahwa hasil dalam setiap tahunnya megalami kenaikan namun kenaikan tersebut tidak sesuai dengan perkebunan kelapa sawit pada umumnya. Jika dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit milik pribadi dengan luas yang sama yaitu 8 Ha dan usia yang sama maka hasilnya akan berbeda jauh lebih banyak hasil perkebunan milik pribadi. Berdasarkan keterangan dari pemilik kebun hasil panen dalam satu tahun bisa mencapai Rp. 40.000.000 sedangkan perkebunan milik desa hanya mencapai Rp.8.769.750 pertahun.

Dengan demikian tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh BUMDes. Hasil usaha dari perkebunan ini tidak sebanding dengan milik pribadi yang jauh lebih banyak hasilnya. sehingga hasil usaha dari perkebunan kelapa sawit belum cukup digunakan untuk keperluan desa. Sedangkan untuk usaha sewa peralatan hiburan sudah cukup baik, karena untuk usaha ini sesuai dengan minat dari pengguna jasa, namun sejauh ini peminat dari sewa peralatan hiburan masih cukup banyak sehingga akan terus menambah pendapatan desa. Untuk pengelolaan pelabuhan hasilnya terus meningkat dan penjual-penjual kelapa sawit masih

dengan baik menggunakan pelabuhan tersebut, sehingga banyak sawit-sawit tersebut akan tetap terjaga dengan baik.

Target dan realisasi dari usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonodadi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Target dan Realisasi BUMDes Desa Wonodadi Tahun 2018

Jenis Usaha	Jumlah atau luas	Target/tahun	Realisasi	Keterangan
Perkebunan Kelapa Sawit	8 Ha	Rp.40.000.000	Rp.8.769.750	Tidak Tercapai
Sewa Peralatan Hiburan (Tenda, kursi, alat makan dan lain-lain).	8 unit tenda, 17 meja, 137 kursi dan peralatan makan.	Rp.5.000.000	Rp.6.050.000	Tercapai
Pengelolaan Pelabuhan Lapak Kelapa Sawit	2 Pelabuhan	Rp.15.000.000	Rp.7.750.000	Tidak Tercapai

Sumber : Direktur BUMDes Desa Wonodadi, 2018

Berdasarkan penjelasan beberapa usaha di atas menunjukan bahwa BUMDes telah berjalan namun tidak berjalan dengan dengan baik. Dilihat dari hasil usaha BUMDes yang belum cukup untuk kebutuhan desa dan tidak dapat digunakan untuk kesejahteraan desanya. Hasil tersebut hanya digunakan untuk perawatan barang milik desa dan untuk perbaikan fasilitas desa. Dari usaha yang didirikan hanya usaha sewa peralatan tenda yang memenuhi target dalam setiap tahunnya, dan usah lainnya belum cukup memenuhi target dan belum terealisasi. Selain itu juga jenis usaha BUMDes yang ada di Desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat desa sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam usaha tersebut. Usaha-usaha yang dijalankan oleh desa hanya untuk menambah pendapatan Desa semata tidak untuk membantu perekonomian masyarakat.

Selain itu beberapa usaha BUMDes yang terkendala dengan sumber dana sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan (2)

menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati harus membantu desa dalam mengembangkan BUMDesnya. Dana yang diterima untuk program BUMDes masih jauh dari harapan untuk kemajuan program-program BUMDes. Dijelaskan juga dalam Peraturan Desa Wonodaadi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa penyertaan modal kepada BUMDes dari pemerintah Desa berasal dari anggaran pendapatan belanja desa tahun angaran 2018.

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/kota haruslah melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi pemodalan. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti acuh tidak memberikan dukungan secara maksilam terhadap BUMDes desa Wonodadi ini.

Meskipun ruang lingkup BUMDes ini masih minim hanya sekitaran desa saja, namun pengelola pihak BUMDes menginginkan desa Wonodadi ini menjadi desa yang mandiri, maju dan dapat meembantu perekonomian masyarakat desa. BUMDes ini tujuannya untuk menjadikan desa yang lebih mandiri dan dapat mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin. Agar didapatkan pendapatan desa yang mencukupi untuk kebutuhan desanya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut masih terdapat masalah dalam melaksanakan BUMDes di Desa Wonodadi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin”.**

Dengan adanya penelitian ini maka perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonodadi

serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan BUMDes di Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan apa saja faktor-faktor yang menghambat kinerja implementasi kebijakan"?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja implementasi kebijkan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kajian ilmu administrasi negara untuk mengetahui proses implementasi kebijakan publik dan faktor yang mempengaruhi, khususnya mengenai implementasi badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan bagi Desa Wonodadi untuk mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan hasil penelitian ini

diharapkan dapat digunakan juga sebagai bahan pembanding bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi).* Bandung : Alfabeta.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta*: Gajah Mada University Press.

H.B, Sutopo.2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press

Moloeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Yogyakarta :Elex Media Komputindo

Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabete : Bandung.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta :CAPS (*Center of Academic Publishing Services).*

Peraturan :

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Internet :

http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/ di akses pada 12 November 2018

Jurnal dan Skripsi :

Budianto, Puguh.2015.*Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor*). Jurnal Politik Muda : Vol 4 No.1 2015:116-125. (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm3cd22097c1full.pdf)

Fajarwati, Yeni. 2016. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang.* Skripsi. Serang.Universits Sultan Ageng Tritayasa. FISIP Ilmu Administrasi Negara. (http://repository.fisip-untirta.ac.id/719/1/skripsi%20full%20-%20Copy.pdf)